



Informasi Strategis

Rabu, 20 Januari 2021

Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
Gedung AH Nasution Lt. 14

BIDANG DALAM NEGERI

Pengerahan Satgas TNI Dalam Tanggap Bencana di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat

1

FAKTA

Pada tanggal 19 Januari 2021, TNI AU mengirimkan 15 tenaga kesehatan Batalyon Kesehatan Denma Mabasau terdiri dari tiga dokter, satu apoteker, dan 11 orang perawat. Selain itu juga TNI AU akan mengirimkan peralatan kesehatan ke Kalsel dan Sulbar. Demikian pula halnya TNI AD telah memberangkatkan rumah sakit lapangan dan 144 personel bantuan medis Yonkes 2 Divisi Infanteri 2 Kostrad dipimpin Danyonkes 2 Letkol Ckm dr. Ayiq Mahmud, Sp OT (K) Spine, menuju Mamuju Sulawesi Barat. Sebelumnya, pada tanggal 18 Januari 2021, KRI dr Soeharso-990 dan 2 unit helikopter TNI AL tiba di Pangkalan TNI AL Mamuju, Sulbar membawa 56 personel Satgas, makanan, minuman, beras, gula, minyak goreng, teh, kopi bubuk, obat-obatan, material alat kesehatan, masker, material bangunan seperti tiang pancang, 33 unit trafo dan alat bantu lapangan, pakaian dan peralatan mandi, 4 unit tenda serba guna, 4 unit tenda peleton, 30 unit veldbed, spre, sarung bantal dan selimut serta sarung tangan dan *t-shirt*. Kedatangan Satgas TNI dan bantuan tersebut disambut langsung Danlantamal VI, Laksma TNI Benny Sukandari.

TINGKAT KERAWANAN KABUPATEN/KOTA



2

ANALISIS

Berdasarkan kondisi geografisnya, wilayah Indonesia sangat rawan bencana. Gempa bumi di Sulbar merupakan bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, karena terdapat 40 lempeng tektonik aktif di Sulawesi yang terus bergerak. Bencana banjir dan longsor merupakan ancaman yang sering terjadi pada saat musim penghujan. Besarnya jumlah korban jiwa dan kerugian materiil sangat bergantung kepada kapasitas Pemerintah dan aparaturnya dalam menanggulangi bencana, termasuk dalam hal tata ruang wilayah serta pemeliharaan kelestarian lingkungan.

3

DAMPAK

Bencana gempa bumi di Sulbar dan banjir di Kalsel telah berakibat jatuhnya korban jiwa dan kerugian materiil, serta terganggunya aktivitas masyarakat dan pemerintahan. Dengan pengiriman Satgas TNI Tanggap Bencana, diharapkan dapat mempercepat penanganan darurat bencana di daerah terdampak.

4

SARAN SATKER/SUBSATKER

Ditjen Strahan Kemhan dan Ditjen Pothan Kemhan perlu mendata dan memetakan aset-aset militer TNI di berbagai wilayah yang dapat dikerahkan untuk OMSP Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana apabila terjadi situasi darurat bencana.

SARAN KEMHAN

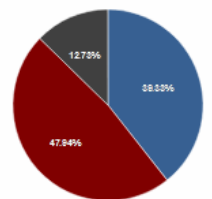
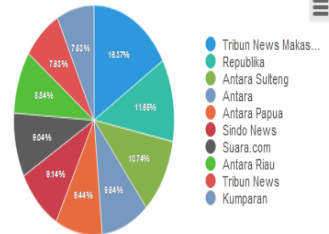
Kemhan perlu merencanakan pengadaan peralatan yang dibutuhkan TNI dalam menggelar berbagai operasi khususnya penanggulangan bencana yang sering terjadi seperti gempa bumi, banjir, longsor, letusan gunung berapi, tsunami, dan kebakaran hutan.

MEDIA EXPOSURE

5.743 Berita Online

8.894574 Cuitan Twitter

205 Posting Facebook



Jepang Tuntut Langkah Konkret Korsel Perbaiki Hubungan Bilateral

1

FAKTA

Hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan sedang memanas. Menlu Jepang Toshimitsu Motegi mendesak Korsel untuk membuat langkah "konkret" untuk menyelesaikan perselisihan bilateral terkait isu masa Perang Dunia II. Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Moon Jae In membuat pernyataan tentang perlunya meningkatkan hubungan, namun mengungkit tuntutan pemenuhan kompensasi bagi korban kerja paksa dan 'wanita penghibur' di masa pendudukan dengan menyita aset perusahaan Jepang di Korsel.



2

ANALISIS

Hubungan bilateral Jepang-Korsel sering naik turun akibat dibayangi oleh sejarah kelam penjajahan Jepang terhadap Semenanjung Korea yang meninggalkan penderitaan bagi warga. Langkah penyelesaian sebenarnya telah diupayakan agar tidak melanggar Perjanjian Bilateral tahun 1965 dan Hukum Internasional. Namun pergantian rezim pemerintah dan dorongan LSM sering mencuatkan kembali tuntutan kompensasi terhadap Jepang.



INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN

MENGKHAWATIRKAN

WASPADA

SIAGA

IMPLIKASI POLITIK

IMPLIKASI SOSIAL

IMPLIKASI EKONOMI

IMPLIKASI HUKUM

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

3

DAMPAK

Tuntutan pengadilan Korsel terhadap Jepang yang dianggap melanggar yuridiksi kedaulatan negara asing (Jepang) dan hukum internasional telah mengakibatkan memanasnya hubungan bilateral kedua negara dan timbul usulan penundaan persetujuan usulan duta besar baru Korsel dari pemerintah Jepang.

4

SARAN

Kemhan melalui forum regional ADMM dan ADMM-Plus di ASEAN agar meningkatkan komitmen kerjasama antar negara di kawasan dengan mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan semangat menjaga perdamaian guna mencapai kemajuan bersama di masa depan.

Demonstrasi Bersenjata Pendukung Trump Menjelang Pelantikan Presiden AS Terpilih Joe Biden

1

FAKTA

Demonstrasi bersenjata yang dilakukan oleh pendukung Trump di beberapa negara bagian AS menjelang pelantikan Presiden AS terpilih Joe Biden pada tanggal 20 Januari 2021 masih berlangsung dan semakin banyak diikuti. Demonstrasi termasuk dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah negara bagian, seperti di Texas, Minnesota, Oregon, Illinois, Nevada dan Michigan. Pendukung fanatik Trump yang melakukan demonstrasi tersebut adalah dari Kelompok Boogaloo Bois dikenal sebagai gerakan ekstremis pro kepemilikan senjata dimana kelompok tersebut menjadi salah satu yang aktif mengajak gerakan protes penolakan hasil Pemilu di seluruh negara bagian AS. Aparat keamanan negara-negara bagian tersebut menyatakan mereka melakukan pengawasan terhadap pergerakan pendukung Trump tersebut, walaupun hingga saat ini diperkirakan jumlahnya masih sedikit sekitar 50-an orang. Selain itu, menurut media lokal, demonstrasi berlangsung selama 30 menit.

INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN

MENGKHAWATIRKAN

WASPADA

SIAGA

IMPLIKASI SOSIAL

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI POLITIK

BERDAMPAK LANGSUNG

IMPLIKASI EKONOMI

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI HUKUM

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK LANGSUNG



2

ANALISIS

Demonstrasi bersenjata yang dilakukan pendukung Trump memang sudah diperkirakan sebelumnya oleh FBI yang mengindikasikan bahwa ada potensi aksi "protes bersenjata" susulan yang akan dilakukan massa pendukung Trump di hari-hari jelang pelantikan Biden. Hal ini dilakukan sebagai sebuah upaya terakhir bagi mereka untuk mengganggu dan menghambat proses transisi politik dalam negeri AS yang akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia internasional karena adanya pertentangan bahkan kerusuhan di Capitol Hill beberapa waktu lalu. Dengan adanya ketidakstabilan politik dalam negeri AS ini, tentu kedepannya akan menjadi tugas yang berat bagi Joe Biden setelah dilantik, termasuk merangkul semua masyarakat AS (pendukung Trump) sesuai dengan janji kampanyenya yakni menjadi Presiden AS bagi semua lapisan masyarakat.

3

DAMPAK

Dengan adanya gelombang demonstrasi bersenjata menjelang pelantikan Joe Biden, tentu memunculkan spekulasi rentan ancaman kerusuhan yang akan kembali terjadi dimana hal tersebut menjadi perhatian dunia internasional. Dunia internasional memandang bahwa AS sedang mengalami keterpurukan dalam hal demokrasi dan menjadi bukti kegagalan pemerintah AS dalam mengelola stabilitas keamanan dalam negeri. Selain itu, demonstrasi bersenjata ini menjadi gambaran betapa besar ancaman terhadap keamanan, terutama karena mudahnya masyarakat AS memiliki kebebasan kepemilikan senjata yang sewaktu-waktu dapat digunakan tidak pada tempatnya.

4

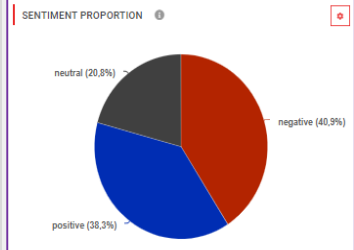
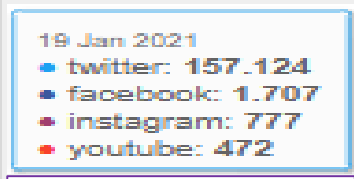
SARAN

Kemhan mendorong Kemlu melalui perwakilan Indonesia di berbagai negara bagian AS untuk memperkuat sistem perlindungan bagi WNI dengan peningkatan infrastruktur dan komunikasi

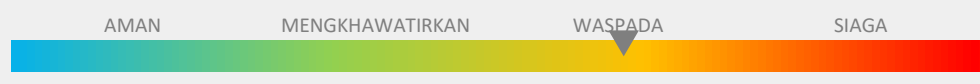
WHO Perjuangkan Keadilan terhadap Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

1 **FAKTA**

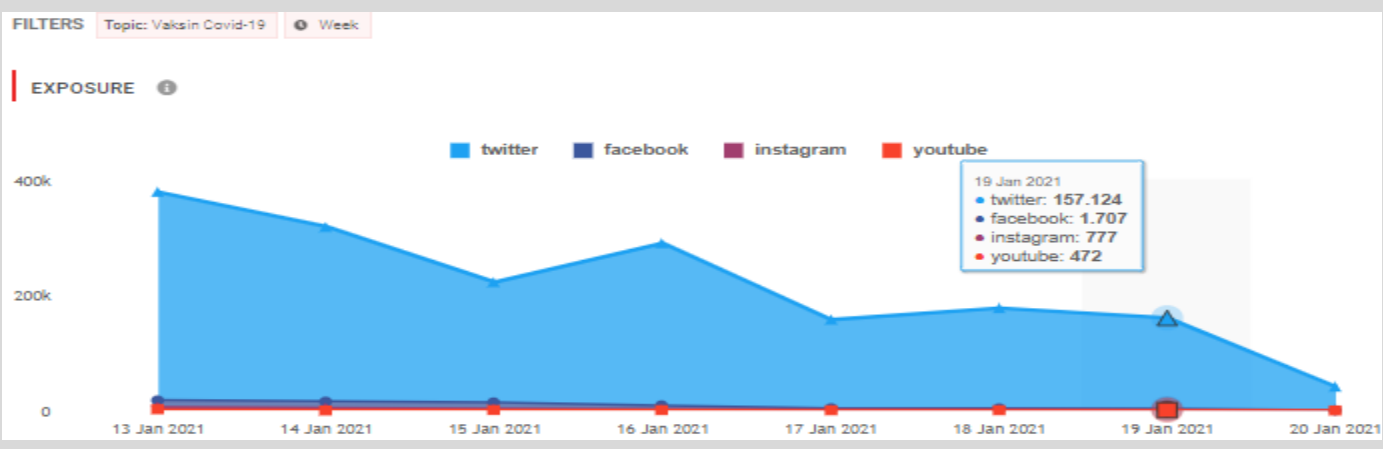
Berdasarkan data Intelligence Socio Analytics (ISA) tanggal 20 Januari 2021, pukul 05.00, isu vaksin Covid-19 dalam perbincangan di Medsos, khususnya platform Twitter mengalami *trend* menurun, dengan proporsi sentimen positif 38,3%, negatif 40,9%, dan netral 20,8%, dimana persepsi netizen cenderung ke arah antisipasi. Pada tanggal 19 Januari 2021, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa tidak adil bagi orang muda dan sehat di negara kaya untuk mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 sementara banyak orang di negara miskin yang rentan terinfeksi virus ini tak mendapatkan vaksin..



LEVEL ANCAMAN ISU VAKSIN COVID-19 DARI MEDSOS DALAM NEGERI



LEVEL ANCAMAN ISU VAKSIN COVID-19 DARI MEDSOS LUAR NEGERI



2 **ANALISIS**

Kemampuan negara-negara miskin dalam pengadaan vaksin Covid-19 menjadi perhatian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut WHO menjadi peringatan bagi komunitas internasional bahwa kebijakan vaksinasi Covid-19 yang tidak seragam di beberapa negara dapat menimbulkan bencana baru. Praktek pengadaan vaksin yang tidak adil dimana vaksin diborong negara maju sementara negara miskin kesulitan mendapatkan vaksin, akan menimbulkan bencana moral dan dampak negatif karena akan mendorong kenaikan harga vaksin dan mendorong penimbunan vaksin. Diperkirakan WHO akan memperjuangkan untuk mempersatukan negara-negara menjadi satu blok sehingga mereka memiliki kekuatan lebih untuk bernegosiasi dengan perusahaan pembuat vaksin, sehingga dapat menjamin semua negara di dunia termasuk negara miskin akan mendapat vaksin Covid-19.

3 **DAMPAK**

Langkah WHO untuk memperjuangkan semua negara memperoleh vaksin Covid-19 akan berdampak berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 secara global dan menghindari timbulnya bencana baru yaitu bencana moral kemanusiaan.

4 **SARAN**

Kemhan mendorong Kemlu untuk berperan dalam diplomasi vaksin di dunia internasional sehingga semua negara memperoleh akses yang adil terhadap vaksin Covid-19 untuk kemanusiaan.

